



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
STKIP PGRI SUMENEP**

**Website : [www.stkipgrisumenep.ac.id](http://www.stkipgrisumenep.ac.id)**

**Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 671732**

**SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN  
SIMILARITY ATAU ORIGINALITY**

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Petugas Check Plagiasi STKIP PGRI Sumenep, menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah ini telah dilakukan cek dan dinyatakan lolos plagiasi menggunakan Aplikasi Turnitin dengan batas maksimal toleransi 20% atas nama:

**Nama : IKE YULI MESTIKA DEWI, M.Pd**  
**NIDN : 0710078803**  
**Program Studi : PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH  
DASAR**

No	Judul	Jenis Karya	Hasil
1	ANALISIS PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS NILAI PESANTREN MELALUI PROGRAM WAJIB BELAJAR DINIYAH JENJANG SMP NEGERI DI KABUPATEN SUMENEP	Artikel	20 %

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Sumenep, 15 Juni 2023

  
turnitin  
STKIP PGRI SUMENEP  
Pemeriksa

# IMplementasi\_Pendidikan\_Berbasis\_Nilai\_Pesantre.pdf

*by* Suhaidi Suhaidi

---

**Submission date:** 15-Jun-2023 05:52AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2116218068

**File name:** IMplementasi\_Pendidikan\_Berbasis\_Nilai\_Pesantre.pdf (988.58K)

**Word count:** 4569

**Character count:** 28514

# IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS NILAI PESANTREN DI SEKOLAH UMUM (Analisis Terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep dalam Membentuk Siswa Berkarakter Religius)

Mohammad Suhaidi

(Dosen STKIP PGRI Sumenep & Sekretaris Dewan Pendidikan Kab. Sumenep)  
Email: emsuhaidi27@gmail.com Hp. 081703027485

## Abstrak

Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk sekolah umum, di satu sisi telah mampu membangkitkan spirit pembudayaan pendidikan diniyah ala pesantren di SMPN 2 Sumenep. Di tengah banyak sekolah formal di wilayah Kota yang belum secara maksimal menerapkan program ini, SMPN 2 Sumenep dengan karakteristik dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak SMPN 2 Sumenep, telah mampu melangkah lebih maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Pengelolaan dan penataan program Wajib Belajar Diniyah di SMPN 2 Sumenep dapat menjadi bentuk nyata komitmen dan rol model penerapan program ini di Kabupaten Sumenep.

Kajian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan sejumlah model pengumpulan data, antara lain observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan metode dokumentasi. Selain itu, populasi dan sampel dilakukan dengan cara penetapan sebagai narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *snow-ball*. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis*.

Pengelolaan Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep bisa dikategorikan berjalan cukup baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Realitas tersebut terjadi karena dibangun dengan komitmen yang kuat dalam menerjemahkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2016 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah. Selain itu, pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep berjalan dengan lancar dan dinamis. Pelaksanaannya dilakukan di dalam lingkungan sekolah secara terpusat. Untuk proses pembelajarannya, pihak sekolah membangun kerjasama dengan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Husnaa Waziyaadah, yang mengelola Madrasah Diniyah Libaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah, melalui ikatan MOU yang jelas, yaitu dengan cara mendatangkan guru-guru diniyah dari lembaga tersebut.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pendidikan, Nilai Pesantren, Wajib Diniyah, Sekolah Umum

## A. Pendahuluan

Demoralisasi dunia pendidikan, telah menjadi problem krusial di Indonesia, termasuk juga di Madura. Berbagai gejala demoralisasi tersebut, terus terjadi tanpa batas usia dan jenis kelamin, mulai masalah narkoba, seks bebas, miras, tindakan kriminal, sampai kasus terbaru yang sempat mengejutkan : perlawanan siswa terhadap seorang guru dengan tindakan yang sulit dinalar oleh logika kepantasan sebagaimana diajarkan dalam dunia pendidikan. Tatakrama atau moralitas, kerap kali telah hadir menjadi sesuatu yang

lain di ruang pendidikan, bahkan proses pendidikan di ruang kelas tanpa sadar malah menciptakan anak didik semakin teralienasi dari jati dirinya sebagai makhluk bermoral.

Hal itu terjadi, tidak lepas dari paradigma pengembangan pendidikan yang sudah mulai ditekankan pada kebutuhan pasar, bukan pada upaya membangun moralitas sebagai pondasi hidup anak didik. Akibatnya, lembaga pendidikan yang hanya mengedepankan logika pasar, acapkali melahirkan generasi baru yang tidak memiliki karakter moralitas

yang tinggi. Semua problem sosial yang mengitari di kalangan anak didik, sejatinya berakar pada kegagalan pendidikan yang sempurna. Pendidikan tanpa moralitas, sama halnya dengan pendidikan tanpa (pendidikan) agama, yang pada gilirannya dapat melahirkan prahara menakutkan dalam dunia pendidikan. Sugito (dalam Zaini, 2011 : 23-24) memberikan ilustrasi menarik tentang masalah ini:

Peserta didik selama ini "dipaksa" mempelajari pengetahuan bukan pendidikan. Kondisi ini dialami oleh hampir semua sekolah dan dalam rata-rata mata pelajaran, terutama bidang studi agama.

Orientasi pasar dalam pengembangan pendidikan telah semakin mengaburkan spirit dasar pendidikan yang seharusnya dikembangkan, yaitu untuk membentuk manusia yang seutuhnya : lahir dan batin yang memiliki kecerdasan ganda antara otak dan hati. Untuk membentuk manusia semacam itu, hanya bisa dilakukan dengan cara memberikan porsi yang seimbang dalam proses pembelajaran, baik materi umum maupun agama, terutama untuk satuan pendidikan umum, seperti SDN, SMPN dan SMAN.

Sebab, satuan-satuan pendidikan tersebut hanya – diakui atau tidak -memberikan porsi pendidikan agama yang sangat minim. Alokasi 2 jam untuk materi agama dalam seminggu, sudah pasti tidak akan mampu memberikan dampak pemahaman keagamaan yang mendalam dan sulit bisa membentuk anak didik yang berkarakter. Paradigma transformasi pengetahuan yang selama ini menjadi fokus dalam dunia pendidikan, sejatinya harus digeser ke paradigma baru untuk memperkuat *character building*. Pendidikan sejatinya, tidak hanya sekedar mengajak anak didik untuk mempelajari ilmu pengetahuan, melainkan dididik untuk menjadi "yang terdidik" dari ilmu pengetahuan yang dipelajari.

Dalam keterkaitan itu, berbagai upaya dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menambah alokasi waktu pemahaman keagamaan di jenjang sekolah formal, baik jenjang SDN, SMPN maupun SMAN. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah Program Wajib Diniyah (Wajib Madin). Dengan program ini, diharapkan akan dapat menjadi jembatan positif bagi kalangan siswa dalam mendalami ilmu agama lebih banyak, dan pada gilirannya akan dapat membentuk karakter religius di kalangan siswa. Apalagi, pembentukan karakter memang menjadi salah satu isu penting pada abad ke-21 saat ini. Menurut A. Busyro Karim (2015 : 71) :

Masalah karakter merupakan wacana menarik di tengah arus kebudayaan global yang terus menggempur sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Sumenep, sehingga menjadi sangat urgen untuk diperkuat melalui pendidikan yang kuat. Masyarakat berkarakter kuat adalah masyarakat yang memiliki akhlak, moral, dan berbudi pekerti yang baik, memiliki kepribadian, kemandirian, keyakinan diri, dan disiplin yang tinggi

Kabupaten Sumenep, termasuk salah satu daerah yang melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah untuk jenjang SDN, SMPN dan SMAN sejak tahun 2016. Hal itu didasarkan pada Peraturan Bupati Sumenep No. Nomor : 15 Tahun 2016, tentang **Wajib Belajar Pendidikan Diniyah**. Peraturan tersebut, secara formal telah menjadi legitimasi tersendiri dalam pelaksanaan program pendidikan keagamaan ini di Kabupaten Sumenep.

Dalam keterkaitan itu, SMPN 2 Sumenep menjadi salah satu sekolah formal di bawah naungan Dinas Pendidikan yang memiliki tanggungjawab untuk menerapkan amanah Perbub sebagaimana mestinya. Berdasarkan informasi yang ada, pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep, berjalan cukup baik. Bahkan untuk jenjang sekolah menengah, SMPN 2 lebih dinamis dan dapat dijadikan sebagai contoh dari implementasi program ini sejak awal penerapan kebijakan ini dalam pemerintahan Super Mantap Jilid II. Integrasi pendidikan berbasis nilai pesantren dalam Wajib Diniyah, khusus di SMPN 2 dapat menjadi awal kebangkitan pendidikan diniyah di sekolah umum, sehingga pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan di SMPN 2 Sumenep dapat menjadi rujukan signifikan dalam keberlangsungan program ini, terutama bagi sekolah-sekolah yang lain di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan gambaran tersebut, dalam kajian ini dapat diajukan beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana komitmen pengelolaan dan pengembangan pendidikan Wajib Diniyah di SMPN 2 Sumenep? *Kedua*, bagaimana model pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep sebagai sarana pembentukan karakter religius di kalangan siswa?

## B. Metodologi Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang menggunakan sejumlah model pengumpulan data, antara lain observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan metode dokumentasi. Selain itu, populasi dan

sampel dilakukan dengan cara penetapan sebagai narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *snow-ball* (Syamsudin, 2007:75). Sementara, teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menggambarkan tentang kategori-kategori yang ditemukan dan muncul dari data yang ada sehingga dapat melahirkan analisis yang obyektif.

### C. Implementasi Program Wajib Madin

Sebagai sebuah kebijakan yang dituangkan melalui Perbub, program Wajib Diniyah yang merupakan penerjemahan dari salah satu program unggulan Pemerintahan Super Mantap Periode 2015-2020, yaitu pada program pendidikan berbasis nilai-nilai pesantren. Tentu saja, program ini menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh semua sekolah, terutama di wilayah kecamatan Kota yang menjadi pilot proyek dari program ini pada tahun 2016-2017. Satuan pendidikan yang berada di wilayah Kota, baik SDN, SMPN, maupun SMAN, secara langsung memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan ini sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam **Perbub No. 15 Tahun 2016, tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah**, Bab II, Pasal 4, poin (2) tujuan penyelenggaraan Wajib Diniyah secara khusus mencakup beberapa hal, yaitu (a) **Membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam**, (b) **Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, Hadist, Tauhid, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, serta Tarikh Islam**. Dengan demikian, pelaksanaan program wajib belajar diniyah ini, dapat mejadi sarana yang tepat bagi sekolah umum untuk memperkuat karakter keagamaan siswa semaksimal mungkin, mengingat materi agama yang diatur dalam kurikulum sekolah formal, sangat terbatas dan relatif tidak memungkinkan dapat memberikan tambahan pengetahuan agama kepada siswa. Apalagi, sekolah umum kerap kali mendapat kritik karena posisi materi agama yang terbatas, salah satunya diungkapkan oleh Abdurrahman Mas'ud (2004:36) :

*Character building* adalah satu hal yang sangat mahal tapi terlupakan dalam dunia pendidikan umum selama ini. Mereka hanya mengejar IP kecerdasan intelektual namun lupa dengan kecerdasan spiritual juga kecerdasan emosional. Maka yang terjadi adalah lahirnya orang-orang yang berdasi, memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dan akrab dengan dunia korupsi.

SMPN 2 Sumenep merupakan salah satu lembaga pendidikan yang secara proaktif menangkap program ini sebagai program yang positif, terutama dalam memperkuat karakter keagamaan para siswa. Sejak pertama kali, kebijakan ini diwajibkan, SMPN 2 Sumenep tampak langsung melakukan langkah-langkah nyata, sebagai ikhtiar agar pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Apalagi, keseriusan dalam melaksanakan kebijakan ini, berarti telah mampu melakukan terobosan baru dalam meretas jalan keluar untuk mengatasi problem karakter di kalangan siswa. Implementasi program wajib diniyah, dapat menjadi bagian dari strategi baru dalam memperkuat pendidikan agama di sekolah formal yang notabene miskin "pengetahuan agama". Disinilah makna penting dari pendidikan agama yang tidak bisa ditinggalkan, seperti yang ditulis oleh KH. A. Sahal Mahfudh dalam tulisannya "*Pendidikan Agama Islam dan Pembentukan Mental Karakter Bangsa*" :

Pendidikan agama adalah satu-satunya kemungkinan yang tertinggal sebagai media yang diharapkan mampu menetralsir dampak buruk materialism dan membangun kembali moralitas sebagai dasar mental dan karakteristik bangsa (Jurnal Milenium, Nomor 1 Tahun 1, Januari-April 1998).

Berdasarkan data yang ada, SMPN 2 Sumenep memiliki jumlah siswa yang cukup banyak, mencapai 946 orang secara keseluruhan. Jumlah ini tentu saja cukup banyak dan secara otomatis menjadi peserta dalam program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah untuk jenjang Diniyah Wustho. Adapun data siswa dan SDM yang dimiliki SMPN 2 Sumenep, sebagaimana tabel berikut :

Tabel :  
Data PTK (Guru & Tendik) dan Peserta Didik

Uraian	Guru	Tendik	PTK	PD
Laki-Laki	29	12	41	547
Perempuan	38	8	46	399
Total	67	20	87	946

Sumber : <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>. Download, 19 November 2018

Dengan data tersebut, peserta Program Wajib Belajar Diniyah di SMPN 2 Sumenep mencapai 946 orang siswa-siswi, terdiri dari 30 rombel, kapasitas ruangan mencapai 30 ruang kelas. Pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perbub dan Juknis. Walaupun, banyak kegiatan proses belajar mengajar, pihak SMPN 2 Su-

menep tetap melaksanakannya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengingat, program ini bukan hanya sekedar amanat Perbup, melainkan juga memiliki misi yang relevan dengan misi SMPN 2 Sumenep dalam rangka memperkuat pemahaman dan perilaku keagamaan para siswa. Menurut penulis bahwa pendidikan agama harus dilakukan secara lebih komprehensif dan metode yang tepat, agar dapat menghasilkan anak didik yang memiliki komitmen murni dalam mengamalkan nilai-nilai agama (Suhaidi, 2018 : 4).

Dalam keterkaitan itu, implementasi program Wajib Madin di SMPN 2 Sumenep, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait di lingkungan pelaksanaan program ini, secara gamblang dapat dipetakan menjadi beberapa hal.

### 1. Kerjasama Formal Berbasis MOU

Sebagaimana diatur dalam Perbub Wajib Belajar Pendidikan Diniyah bahwa setiap jenjang pendidikan (SDN dan SMPN) dapat bekerjasama dengan lembaga diniyah terdekat dalam pelaksanaannya. Hal ini telah dilakukan di SMPN 2 Sumenep dengan bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Husnaa Waziyaadah, yang mengelola Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah. Kerjasama ini tentu saja merupakan langkah nyata pihak SMPN 2 Sumenep dalam menerjemahkan amanat Perbub dalam pelaksanaan program penting ini.

Yang menarik, pihak SMPN 2 Sumenep dalam membangun kerjasama dengan Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah dilakukan dengan pola kerjasama formal yang saling mengikat dan bertanggungjawab dalam bentuk MOU kedua-dua pihak. Seperti diungkapkan oleh Miftahul Munir, Wakil Kepala Kurikulum dan Pelaksana Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep :

“SMPN 2 Sumenep melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah bekerjasama dengan MDT Al-Husna. Kemudian, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di SMPN 2 Sumenep dengan guru pengajar dari MDT Al-Husna. Hari pelaksanaan wajib Diniyah selama tiga hari, yaitu Senin, Selasa dan Rabu” (Wawancara, 2 Agustus 2018).

Dengan MOU yang dilakukan, menunjukkan bahwa pihak SMPN 2 Sumenep memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena MOU formal yang dilakukan dengan pihak kedua, merupakan gambaran tentang manajemen kerjasama sebuah lembaga yang bermutu. MOU antara SMPN 2 Sumenep dengan Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat

Alhusnaa Waziyaadah, di sisi lain juga memberikan penjelasan tentang komitmen SMPN 2 dalam menerjemahkan salah satu program unggulan Bupati Sumenep ini secara profesional. Ikatan MOU yang dilakukan oleh SMPN 2 Sumenep dengan Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah, merupakan bentuk komitmen pengelola SMPN 2 Sumenep dalam menyukseskan program pendidikan berbasis nilai pesantren ini di SMPN 2 Sumenep, sehingga dapat memperkuat tercapainya tujuan pendidikan yang dikembangkan di lembaga tersebut. Tujuan pendidikan, seperti ditulis oleh Heri Gunawan (dalam Taufikurrahman, 2016 : 11), bahwa :

Tujuan pendidikan merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan ke dalam pribadi anak didik. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan bersifat komprehensif, mencakup semua aspek dan terintegrasi dalam pola kepribadian yang ideal. Tujuan pendidikan merupakan masalah inti di dalam pendidikan dan saripati dari seluruh renungan paedagogik.

Komitmen SMPN 2 Sumenep dalam melaksanakan program ini, juga tampak dalam masalah waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Perbub No. 15 Tahun 2016, yaitu Bab VI, tentang pembelajaran dan evaluasi, Pasal 10, point (3) “*Waktu pembelajaran wajib diniyah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu dengan durasi 2 (dua) jam pelajaran*”.

Inisiatif untuk melaksanakan sendiri kegiatan wajib diniyah ini dilakukan setelah melihat kondisi yang berkembang sebelumnya. Pada awal pelaksanaan program ini, pihak SMPN 2 Sumenep, sempat memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengikuti sekolah diniyah di luar lingkungan sekolah, tetapi realitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan fakta yang ada, banyak siswa yang tidak mengikuti anjuran tersebut. Atas dasar itu, pihak SMPN 2 Sumenep melakukan terobosan dengan cara membawa madin ke lingkungan SMPN 2 Sumenep. Hal itu dilakukan dengan cara membangun kerjasama dengan Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah. Hal itu dilakukan agar siswa dapat melaksanakan program ini secara efektif, apalagi program ini memiliki makna yang luar biasa dalam membentuk karakter keagamaan anak didik, seperti digambarkan oleh Miftahul Munir :

Pada awalnya kami memberikan kesempatan untuk sekolah diniyah di luar. Yang penting sekolah dulu. Hanya saja ketika kami beri kesempatan,

hanya terdapat beberapa siswa saja yang sekolah diniyah di luar. Akhirnya, kami mengambil inisiatif untuk melaksanakan madin di lingkungan sekolah. Artinya, anak-anak setelah sekolah, langsung mengikuti madin di SMPN 2 Sumenep. Kemudian kami kerjasama dengan Yayasan AL-Husna. Kami menyediakan tempat dan murid, sementara guru didatangkan dari AL-Husna (Wawancara, 1 Agustus 2018)

Dalam kerangka itu, pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep dengan komitmen yang besar, bisa dianggap sebagai upaya maksimal dalam meretas problem pendidikan agama yang terbatas sebagaimana terjadi di sekolah-sekolah umum, yang notabene masih diposisikan pada posisi yang terbatas ; tidak seluas posisi materi-materi umum lainnya. Dalam hal ini, penulis pernah mengurainya dalam sebuah surat kabar dengan judul "*Sekolah Tanpa Pendidikan Agama (?)*":

Pendidikan agama (khususnya di sekolah-sekolah umum) kerap kali masih diposisikan sebagai materi pelengkap yang posisinya tidak lebih penting dari materi-materi yang lain, seperti Matematika, Bahasa Inggris dan materi-materi umum lainnya. Materi-materi itu di sekolah umum seperti mendapatkan jatah jam yang cukup, berbeda dengan materi agama yang hanya diberi alokasi waktu antara 2-3 jam setiap minggu. Dengan alokasi waktu yang sangat terbatas tersebut, jelas sekali siswa tidak bisa menerima pendidikan agama secara seimbang dan maksimal, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya proses eliminasi religiusitas dalam diri siswa (Kabar Madura, 01 Oktober 2012)

## 2. Sekolah sebagai Pusat Pendidikan Diniyah

Sebagaimana disebutkan dalam Juknis Pendidikan Wajib Belajar Diniyah yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dalam pelaksanaan wajib pendidikan diniyah bisa dilaksanakan dengan beberapa model, antara lain. *Pertama*, dilaksanakan di dalam lingkungan madrasah diniyah sendiri. Artinya, siswa dapat secara langsung belajar agama di setiap lembaga diniyah yang dekat dengan rumah masing-masing. *Kedua*, kegiatan pendidikan wajib belajar diniyah dapat dilaksanakan di sekolah dengan cara mendatangkan guru diniyah ke sekolah.

Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan diniyah di SMPN 2 Sumenep memilih opsi yang kedua, yaitu membangun kerjasama dengan madin dan pelaksanaannya dilaksanakan di dalam lingkungan SMPN 2 Sumenep. Untuk jenjang satuan pendidikan menengah hanya dilakukan di SMPN 2 Sumenep. Pilihan model pelaksanaan yang dilaksanakan

oleh SMPN 2 Sumenep, secara substansial lebih tepat dalam menerjemahkan semangat Perbup. Dengan mengundang pihak Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah melaksanakan proses belajar mengajar di lingkungan SMPN 2 Sumenep akan dapat menciptakan proses pembelajaran wajib diniyah lebih efektif dan bisa terkontrol dengan baik, karena semua proses telah dilaksanakan secara terpusat. Walaupun, terdapat sebagian siswa yang mengikuti pendidikan diniyah di luar lingkungan SMPN 2 Sumenep, karena sebelumnya memang sudah tercatat sebagai siswa Madin sebelum Perbup ini berlaku. Walaupun demikian, kontrol dan pengawasan dari pihak sekolah, tetap dilakukan secara intensif. Hal itu diungkapkan oleh Miftahul Munir:

Sebagian besar siswa mengikuti madin di SMPN 2 Sumenep, hanya ada sebagian yang mengikuti di luar, karena sebelumnya memang sudah belajar di madin tersebut. Bagi siswa yang mengikuti madin di luar, kami sifatnya kerjasama, misalnya ada yang dari An-Najah, al-Kautsar dan lain sebagainya. Kami juga memantau apakah siswa ini sekolah atau tidak. Jadi, pihak sekolah melakukan pemantauan yang intensif (Wawancara, 29 Juli 2018)

Dalam konteks itulah, semangat membawa pendidikan berbasis nilai pesantren ke dalam lingkungan sekolah formal, seperti yang menjadi kebijakan SMPN 2 Sumenep, dibandingkan dengan pola-pola kerjasama yang dilaksanakan oleh sekolah pelaksana wajib belajar pendidikan diniyah di wilayah kota Sumenep yang lain, lebih menggambarkan tentang arah pengelolaan program wajib belajar diniyah yang jelas dan relevan dengan semangat Perbup maupun juknis yang ada. SMPN 2 Sumenep mampu menerjemahkan program ini bukan hanya sekedar untuk menyenangkan instansi di atasnya, melainkan menganggap program ini sebagai program penting yang layak untuk dibumikan dalam lembaga pendidikan formal. Hal itu menunjukkan bahwa SMPN 2 Sumenep memang memiliki spirit yang kuat dalam mewujudkan program itu, sehingga dapat menimbulkan satu kekuatan positif di dalam pengelolaan program ini. Spirit yang oleh Plato diyakini sebagai salah satu kekuatan jiwa manusia, telah berhasil dijadikan sebagai kekuatan untuk memformulasi dan menyelesaikan implementasi Program Wajib Diniyah secara maksimal. Menurut Plato ( dalam Soemanto, 2006 : 13) :

Spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Spirit adalah kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan.

### 3. Pembiayaan Melalui Infak Orang Tua

Salah satu problem dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah terletak pada masalah anggaran dan pembiayaan, walaupun kegiatan ini telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pendidikan, tetapi tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah secara teknis dalam pelaksanaan program ini, termasuk yang dirasakan di SMPN 2 Sumenep. Alokasi anggaran yang sangat minim, untuk guru pengajar melalui APBD tersebut, kerap kali dianggap sebagai kebijakan "yang kurang berpihak terhadap kesejahteraan guru-guru" yang terlibat dalam program wajib belajar pendidikan diniyah ini. Tentu saja honor Rp.75.000, kemudian tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp. 150.000 untuk setiap guru yang diterima dalam sebulan, memberikan bukti tentang ketidakmampuan dinas pendidikan dalam memperhatikan kesejahteraan para guru sebagaimana layaknya. Bahkan, dengan honor yang relatif sangat rendah tersebut - apabila dibaca dalam kacamata pendidikan kritis - bisa disebut sebagai bentuk kurang memanusiakan guru wajib diniyah sebagai manusia yang sebenarnya.

Dengan kebijakan honorarium berkisar Rp. 75.000 - Rp. 150.000, yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan, bisa diasumsikan bahwa Dinas Pendidikan masih belum sepenuhnya mampu memahami posisi guru (diniyah) yang sebenarnya. Seorang guru sejatinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan penuh tantangan, apalagi dalam kasus Program Wajib Diniyah ini, seorang guru bertugas mencerdaskan religiusitas anak didik. Terkait posisi sulit seorang guru ini, layak merenungkan tulisan Colin Rose dan Malcolm J. Nicholl (2002:453) :

Sekaranglah saat yang tepat untuk mengakui bahwa guru melakukan pekerjaan yang sulit dan penting, pekerjaan yang mensyaratkan keterampilan tinggi. Dan syarat keterampilan akan lebih besar ketika guru sekolah lanjutan pertama menerima peran lebih banyak daripada seorang tutor universitas ; maksudnya, sebagai mentor dan penasihat di samping sebagai guru. Mereka juga akan (atau harus) memikul tanggung jawab untuk mengajarkan subjek-subjek yang lebih menantang, termasuk kecakapan berfikir kritis, keterampilan berkomunikasi, dan kematangan emosi.

Dalam konteks itu, untuk menyasiasi problem pembiayaan tersebut, pihak SMPN 2 Sumenep melakukan terobosan-terobosan yang strategis, yaitu dengan cara menggandeng komite dalam mencari solusi, agar program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah ber-

jalan efektif dan maksimal. Inisiasi (gerakan) berinfak menjadi langkah nyata yang dilakukan oleh pengelola SMPN 2 Sumenep, yang pada gilirannya dapat menjadi jalan bagi keberlangsungan program ini. Masalah honorarium tenaga pengajar dalam program ini, selangkah lebih maju daripada sekolah yang lain. Bahkan, dengan gerakan infak oleh para wali siswa, menunjukkan semangat kemandirian SMPN 2 Sumenep dalam menyukseskan program luhur ini.

Untuk membayar honorarium para guru diniyah, gerakan infak dari wali siswa telah menjadi tradisi yang cukup positif dalam menopang biaya honorarium para guru. Gerakan infak ini merupakan inisiatif Komite Sekolah yang telah mampu memosisikan keberadaannya sebagai jembatan yang pas ; antara wali murid dengan pihak sekolah dalam upaya pengembangan program sekolah. Eksistensi Komite Sekolah di SMPN 2 Sumenep, memiliki tekad yang sama dalam mewujudkan visi sekolah untuk mencetak siswa-siswa yang berkarakter dan memiliki spirit religiusitas yang tinggi. Hal itu diungkapkan oleh Tadjul Arifin, Ketua Komite SMPN 2 Sumenep :

Komite Sekolah memandang bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah diwujudkan. Komite Sekolah juga memiliki tanggungjawab agar program Bupati ini sukses di SMPN 2 Sumenep. Dengan program ini, bisa dipastikan para siswa bisa terkontrol dengan baik dalam mengikuti pendidikan diniyah-nya. Sebagai wujud komitmen itu, pihak komite kemudian membangun komunikasi dengan para wali murid untuk ikut berpartisipasi dalam segi pendanaan melalui infak yang diberikan seikhlasnya. Tak ada kewajiban bagi wali murid untuk berinfak, tak ada pemaksaan dan tak ada intervensi dari pihak sekolah. Komite Sekolah memberikan kebebasan kepada wali murid, yang berkenan silahkan berinfak. Sementara, bagi yang tidak berkenan, tidak ada masalah. Infak dari wali siswa tersebut, akan digunakan untuk keberlangsungan program diniyah di SMPN 2 Sumenep (Wawancara, 19 November 2018).

Dengan gerakan berinfak ini, keterlibatan wali murid menjadi nyata dalam menyukseskan program Wajib Belajar Diniyah di SMPN 2 Sumenep. Dari segi anggaran, keberadaan infak tersebut telah mampu menjadi salah satu kekuatan dalam menopang keberlangsungan program ini. Setidaknya, honorarium para guru yang dilibatkan dalam program ini, bisa teratasi dengan baik, tanpa harus menunggu anggaran dari pemerintah.

Dalam keterkaitan itu, pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan di



SMPN 2 Sumenep, dilakukan dengan cara membangun partisipasi segenap *stakeholder* pendidikan di lingkungan sekolah tersebut, baik wali siswa maupun komite sekolah. Eksistensi komite sekolah di SMPN 2 Sumenep dalam pelaksanaan program ini, tidak hanya sekedar menjadi stempel sekolah, melainkan telah mampu mentransformasikan keberadaannya sebagai mitra sekolah yang bermakna dan transformatif. Di tengah problem pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah muncul di sekolah itu, Komite Sekolah mampu hadir menjadi kekuatan nyata yang dapat membuka jalan bagi keberlangsungan program bernuansa religi tersebut. Problem pembiayaan pun, dapat diatasi dengan cara membangun kesadaran berinfak dari kalangan wali siswa yang tidak mengikat.

Gerakan yang dimunculkan pada dasarnya untuk memperkuat eksistensi komite dan wali siswa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan sekolah. Masyarakat memiliki tanggungjawab dalam menghidupkan pendidikan sesuai dengan kemampuan masing-masing, yang dalam program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016, seperti disebutkan dalam Bab V, Pasal 7, antara lain : (1) **Orang tua** berhak **berperan serta dalam penyelenggaraan** Program Wajib Diniyah sesuai dengan peraturan yang berlaku, (2) **Orang tua peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkewajiban mengikutsertakan anaknya pada Wajib Diniyah,** (3) **Masyarakat dan orang tua peserta didik berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan/atau dana dalam penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah sesuai dengan tingkat kemampuannya.**

#### D. Kesimpulan

Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep dapat dijadikan sebagai rujukan bagi sekolah yang lain dalam mewujudkan amanah sebuah Perbub tentang program luhur ini. Pengelola SMPN 2 Sumenep – terlepas dari kelebihan dan kekurangannya – selama masa 2016-2018, menggambarkan tentang sebuah komitmen dalam memulai, menata dan mengembangkan program baru pendidikan keagamaan dalam lingkungan sekolah umum, yang notabene tergolong baru di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan kajian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan menjadi beberapa argumen, antara lain :

*Pertama*, pengelolaan Program Wajib Belajar Pen-

didikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep bisa dikategorikan berjalan cukup baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Realitas tersebut terjadi karena dibangun dengan komitmen yang kuat dalam menerjemahkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2016 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah. Secara faktual, komitmen tersebut telah menjadi bagian dari kesadaran semua pihak di lingkungan SMPN 2 Sumenep, baik pengelola, guru, dan para siswa. Yang sangat penting, Komite Sekolah dan para wali siswa juga memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan program ini. Tidak heran, apabila komite sekolah dan para wali siswa dapat menjadi salah satu tulang punggung dalam menyediakan kebutuhan biaya program ini melalui gerakan infak yang diberikan secara suka rela.

*Kedua*, pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep berjalan dengan lancar dan dinamis. Pelaksanaannya dilakukan di dalam lingkungan sekolah secara terpusat. SMPN 2 Sumenep mampu menjadikan sekolah sebagai pusat dari pelaksanaan program ini, sehingga efektifitas pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan keagamaan ini, dapat dikategorikan sebagai sekolah dengan pengelolaan yang terbaik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kebijakan ala SMPN 2 Sumenep ini merupakan wujud keberanian pihak sekolah membawa pendidikan diniyah ke ruang sekolah formal yang notabene jarang dilakukan oleh lembaga formal lainnya. Perbub Nomor 15 Tahun 2016, telah mampu dibumikan secara utuh dalam kehidupan pendidikan di SMPN 2 Sumenep yang layak diunggulkan. Untuk proses pembelajarannya, pihak sekolah membangun kerjasama dengan Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah melalui MOU yang jelas. Guru-guru diniyah didatangkan oleh pihak Madrasah Diniyah Lilbaniin Walbanaat Alhusnaa Waziyaadah dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedubelah pihak. Bahkan, untuk menopang kesuksesan pelaksanaan program ini, Komite Sekolah memberikan dukungan dan peran penting dalam mengorganisir para orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam aspek pendanaan melalui infak yang tidak mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Karim, A Busyro.** 2015. *Ijtihad Kebijakan : Catatan Pemikiran dan Solusi dalam Membangun Kabupaten Sumenep Selama 5 Tahun (2010-2015)*. Surabaya : Muara Progresif.
- Mas'ud, Abdurrahman,** *Antologi Studi Agama dan Pendidikan*. Semarang : CV Aneka Ilmu
- Rose, Colin & Malcolm J. Nicholl.** 2002. *Accelerated Learning for The 21 st Century : Cara Belajar Cepat Abad XXI*. Bandung : Penerbit Nuansa
- Soemanto, Wasty.** 2006. *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpinan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suhaidi, Mohammad.** 2018. *Pendidikan Agama Berbasis Wisata Religi: Studi Model Belajar Langsung Ilmu Agama ala Siswa Zaman Now*. Sumenep: Abida Mahran.
- Zaini, Muhammad.** 2011. *Membumikan Tauhid : Konsep dan Implementasi Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu
- Jurnal Milenium,** Nomor 1 Tahun 1, Januari-April 1998
- Mohammad Suhaidi,** "Sekolah Tanpa Pendidikan Agama (?)". Kabar Madura, 1 Oktober 2012
- Taufikurrahman,** *Konsep Pendidikan Unggul dalam Al-Quran : Kajian Tematis Surat Luqman*. *Jurnal Literasi*, Volume 01, Nomor 01, Desember 2015- Pebruari 2016

# Implementasi\_Pendidikan\_Berbasis\_Nilai\_Pesantre.pdf

---

## ORIGINALITY REPORT

---

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

2%

★ [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On